BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Sumur Illegal
Edisi : 24 April 2008
Halaman : A14

DKI Sulit Deteksi Sumur Ilegal

Kasus pencurian air terus meningkat.

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak mempunyai alat georadar yang dapat mendeteksi keberadaan sumur bor di gedung bertingkat.

"Sulit untuk memantau keberadaan sumur ilegal," kata Kepala Dinas Pertambangan DKI Jakarta Peni Susanti kepada wartawan di Kawasan Jati Baru, Jakarta, kemarin.

Peni mengatakan pencurian air tanah setiap tahun terus meningkat. Pada 2004, ada 400 penyegelan terhadap sumur ilegal di seluruh Jakarta. Sedangkan pada 2007 naik menjadi 1.700 kasus penyegelan sumur ilegal.

Pemerintah menengarai jumlah pencurian air tanah jauh lebih banyak ketimbang yang telah ditertibkan. Selama ini penertiban dilakukan dengan cara mendatangi lokasi atau informasi dari masyarakat. Kendalanya, kata dia, terbatasnya sumber daya manusia.

Dengan georadar diharapkan pengungkapan pencurian air tanah bisa ditingkatkan dan lebih efisien, karena georadar dapat menjangkau keberadaan sumur bor dengan radius sekitar 10 sampai 20 meter. "Akan diajukan pengadaan lima alat georadar dalam anggaran perubahan 2008," kata Peni tanpa menyebutkan jumlah anggarannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pajak dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan, pengambilan air tanah dibatasi sebanyak 100 meter kubik per hari. Setiap bangunan yang akan memanfaatkan air tanah pun harus mendapat izin dari Dinas Pertambangan.

Kenyataannya, kata Peni, banyak yang membangun sumur bor lebih dari yang diizinkan semula. Selain penyediaan air bersih oleh Perusahaan Air Minum belum maksimal, banyaknya penggunaan air tanah juga karena tarifnya lebih murah, sekitar Rp 3.500 per meter kubik. Rencananya, tarif air tanah akan dinaikkan enam kali lipat.

Saat ini, ada 3.500 pemakai air tanah yang terdaftar di Dinas Pertambangan. Setiap tahun 20 juta meter kubik air tanah tersedot. Berdasarkan data Dinas Pertambangan, penurunan permukaan air tanah di Jakarta rata-rata 4-8 meter per tahun. Akibatnya, muka tanah di Jakarta turun 0,8 meter per tahun.

Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Hari Sasongko mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penurunan muka tanah di kawasan gedung bertingkat. "Fondasi gedung telah disesuaikan dengan struktur tanah," katanya. **Rudy Prasetyo**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup